

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOTA PALOPO
(Studi Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
Kota Palopo)**

Rahmawati^{*1}, Halim Husman²
Universitas Muhammadiyah Palopo, Indonesia^{*12}
waliyuddinjabir@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of the presentation of regional financial reports on the accountability of regional financial management of the city of Palopo. The data in this study were obtained from the Palopo city bpkad who were willing to become respondents. This study uses primary data by conducting direct research in the field by providing a questionnaire / question sheet to 60 respondents. The data analysis method used is simple linear regression analysis. The results showed that: partially, the variable presentation of regional financial statements has a positive and significant effect on the accountability of regional financial management in the city of Palopo.

Keywords: *presentation of regional financial reports, accountability of regional financial management of the city of Palopo*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kota palopo. Data dalam penelitian ini diperoleh dari bpkad kota palopo yang bersedia menjadi responden. Penelitian ini menggunakan data primer dengan cara melakukan penelitian langsung dilapangan dengan memberikan kuesioner/lembar pertanyaan kepada 60 responden. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: secara parsial, variable penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kota palopo.

Kata Kunci: *presentation of regional financial reports, accountability of regional financial management of the city of Palopo*

PENDAHULUAN

Reformasi di berbagai bidang yang sedang berlangsung di Indonesia telah membawa perubahan terhadap sistem politik, sosial, masyarakat serta ekonomi sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik. Salah satu agenda reformasi yaitu adanya otonomi daerah dan sistem pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang telah disebutkan di atas membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing. Sebagai operasionalnya maka Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59, Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan Pemerintah Pusat yang memberlakukan otonomi daerah merupakan langkah yang konkrit dalam mewujudkan desentralisasi pemerintahan yang sesungguhnya.

Maksud dari Pemerintah Pusat memberikan hak otonomi kepada pemerintah daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Seiring adanya pemberlakuan otonomi daerah oleh pemerintah pusat, maka pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab yang lebih besar untuk mendayagunakan potensi daerahnya masing-masing demi memajukan daerah tersebut (Safitri, 2009).

Otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sector publik di Indonesia. Dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternative sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (sharing) dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat.

Dalam pengelolaan keuangan harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No.13 tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, mulai dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran sampai pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah. Sedangkan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah.

Pengelolaan keuangan daerah mencakup aktivitas; perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi (PP. No. 58 tahun 2005). Pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan agar setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah berdampak terhadap kepentingan dan kebutuhan publik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, Haryanto (2007) dalam Rohman (2009). Pengelolaan keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan ditandai dengan hasil laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Menurut Wilson dan Kattelus (2002) dalam Rohman (2009). Akuntabilitas publik pengelolaan keuangan pemerintah dapat diwujudkan dengan penyajian laporan keuangan yang terdiri dari laporan periodik (periodic reports), laporan keuangan interim (interim financial reports), dan laporan keuangan tahunan (annual financial reports). Dari ketiga laporan keuangan tersebut, yang wajib dipublikasikan oleh pemerintah agar dapat diakses publik adalah laporan keuangan tahunan. Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi pemerintah. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Penyusunan laporan keuangan pemerintah harus mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penerapan SAP membawa konsekuensi juga pada perubahan sistem akuntansi. Sistem akuntansi memang tidak diatur dalam SAP tetapi entitas harus merancang sistem akuntansinyasendiri yang dapat menghasilkan laporan keuangan sesuai SAP. Perubahan-perubahan yang ada pada sistem akuntansi itu secara wajar berpengaruh pada undang-undang yang mengatur mengenai akuntabilitas publik.

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Pertanggungjawaban itu tidak hanya wajib disampaikan kepada lembaga legislatif, tetapi juga kepada masyarakat sebagai pemberi mandat atau kekuasaan kepada pemerintah.

Perbaikan transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu kunci bagi keberhasilan pe-rombakan yang dilakukan pemerintah terhadap tatanan ekonomi publik. Perubahan era orde baru ke era reformasi menuntut pelaksanaan akuntabilitas publik dalam melaksanakan setiap aktivitas kemasyarakatan dan pemerintahan. Akuntabilitas membawa hasil sebagai

notasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Indikator hasil seperti ekonomi, efisiensi, dan efektivitas harus dapat dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban pemerintah, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Seiring dengan perkembangan sektor publik yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini mengenai kuatnya tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan atas lembaga-lembaga publik, baik pada di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tuntutan tersebut meliputi perlu dilakukannya sebuah transparansi kepada publik serta pemerintah juga perlu melakukan pemberian informasi kepada publik yang didasarkan atas pemenuhan hak-hak publik (Stanbury, 2003). Kurangnya pemerintah dalam melaksanakan akuntabilitas untuk sekarang ini menyebabkan pertanggungjawaban pemerintah daerah berupa laporan keuangan belum sepenuhnya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Hal ini karena disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang tidak aksesibel dan kurang lengkap itu secara mudah menurunkan kualitas dari akuntabilitas laporan keuangan daerah.

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Secara umum akuntabilitas diartikan sebagai sebuah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik.

Berdasarkan UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) mengenai ketentuan pengelolaan keuangan negara dinyatakan bahwa pada prinsipnya pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah (pusat dan daerah) harus dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Ketentuan pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud adalah mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban (Akuntabilitas pengelolaan keuangan).

Dalam kaitannya dengan penyajian laporan keuangan daerah telah terjadi reformasi yang mendasar yaitu mengharuskan kepala daerah untuk menyusun dua jenis laporan keuangan baru yang meliputi neraca daerah dan laporan arus kas. Akan tetapi, upaya perbaikan di bidang penyajian laporan keuangan daerah ini nampaknya belum dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Masalah lainnya yang timbul adalah kurangnya publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah secara transparan (melalui surat kabar, internet, atau dengan cara yang lainnya) nampaknya belum menjadi hal yang umum.

Permasalahan akuntabilitas publik menjadi sangat penting sejak dilaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu sejak Januari 2001, salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tersebut adalah untuk menciptakan good governance, yaitu pemerintahan yang baik yang ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi dan efektivitas, serta penegakan hukum. Reformasi akuntansi keuangan daerah dan manajemen keuangan daerah kemudian banyak dilakukan dalam rangka memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan publik (Sukhemi, 2010).

Dalam kaitannya untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah maka pemerintah daerah harus menyajikan laporan keuangannya secara baik dan memberi kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses melihat pengelolaan keuangan daerah. Salah satu alat untuk menciptakan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan keuangan merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja finansial pemerintah daerah.

Penyajian laporan keuangan adalah penyajian informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan PSAK No .1 (Revisi 2009). Pengelolaan keuangan daerah dimana penyajian laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan

mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan (PP No. 71 Tahun 2010).

Oleh sebab itu pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang diterima umum. Laporan keuangan yang wajib dibuat oleh pemerintah daerah adalah laporan realisasi anggaran, naraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan atas laporan keuangan merupakan elemen penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berarti semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah maka berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kota Palopo?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi di atas, tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Teori Atribusi

Teori keagenan (Agency theory) merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut "nexus of contract" (Subaweh, 2008).

Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah pemerintah yang bertindak sebagai agen (pengelola pemerintahan) yang harus menetapkan strategi tertentu agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk publik sebagai pihak prinsipal. Pihak prinsipal tentu menginginkan hasil kinerja yang baik dari agen dan kinerja tersebut salah satunya dapat dilihat dari laporan keuangan dan pelayanan yang baik, sedangkan bagaimana laporan keuangan dan pelayanan yang baik tergantung dari strategi yang diterapkan oleh pihak pemerintah.

Laporan Keuangan Daerah

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2017:2) "Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas." Sedangkan pengertian laporan keuangan menurut Harahap (2015: 105) "Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu." Pengertian laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (2009:1) Laporan keuangan meliputi bagian dari proses laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas/laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Penyajian Laporan Keuangan

Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.

Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam standar akuntansi pemerintahan lainnya.

Komponan pelaporan keuangan merupakan satu set laporan, terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran; (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (3) Neraca; (4) Laporan Operasional; (5) Laporan Arus Kas; (6) Laporan Perubahan Ekuitas; (7) Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang. Entitas pelaporan menyajikan informasi untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan hasil operasi entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Penyajian laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting. Pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas (Diamond, 2002). Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1, alinea 49, (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) dinyatakan bahwa neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut: kas dan setara kas; investasi jangka pendek; piutang pajak dan bukan pajak; persediaan; investasi jangka panjang; aset tetap; kewajiban jangka pendek; kewajiban jangka panjang; dan ekuitas dana.

Akuntabilitas Keuangan Daerah

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No.589/IX/6/Y/99 dalam Sitompul (2003), akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak/berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Oleh karena itu, pemberlakuan undang-undang otonomi daerah harus dapat meningkatkan daya inovatif dari pemerintah daerah untuk dapat memberikan laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun masyarakat luas. Kualitas Pemerintahan Daerah yang baik (good governance) tidak hanya ditentukan oleh akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan supremasi hukum.

Namun, kualitas pemerintahan yang baik juga ditentukan oleh faktor-faktor lain seperti responsiveness, consensus orientation, equity efficiency, effectiveness dan strategic vision. Hal ini sesuai dengan karakteristik pelaksanaan pemerintahan yang baik menurut UNDP dan World Bank. Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi public antara lain, yaitu: 1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum yaitu akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. 2. Akuntabilitas Proses yaitu terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. 3. Akuntabilitas Program yaitu terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. 4. Akuntabilitas Kebijakan yaitu terkait dengan pertanggungjawaban pembina, pengurus dan pengawas atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Osborne (1992) dalam Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa Akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan

apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana. Pertanyaan yang memerlukan jawaban tersebut antara lain, apa yang harus dipertanggungjawabkan, mengapa pertanggungjawaban harus diserahkan, kepada siapa pertanggungjawaban diserahkan, siapa yang bertanggung jawab terhadap berbagai bagian kegiatan dalam masyarakat, apakah pertanggungjawaban berjalan seiring dengan kewenangan yang memadai, dan lain sebagainya. Konsep pelayanan ini dalam akuntabilitas belum memadai, maka harus diikuti dengan jiwa *etepreneurship* pada pihak-pihak yang melaksanakan akuntabilitas. Katz (2004) menyatakan bahwa transparansi merupakan proses demokrasi yang esensial di mana setiap warga negara dapat melihat secara terbuka dan jelas atas aktivitas dari pemerintah mereka daripada membiarkan aktivitas tersebut dirahasiakan. Jiwa dari sistem ini adalah kemampuan dari setiap warga negara untuk memperoleh informasi melalui akuntabilitas pejabat pemerintah atas kegiatan yang mereka lakukan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dinyatakan bahwa komponen yang harus terdapat dalam suatu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah meliputi; Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 58 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengadilan intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Akuntabilitas dan keadilan merupakan atribut yang terpisah. Akan tetapi, dua istilah yang pertama adalah tidak independen, sebab pelaksanaan akuntabilitas memerlukan transparansi (Shende dan Bennett, 2004). Akuntabilitas keuangan daerah adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Hipotesis

Penyajian laporan keuangan merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Pemerintah Daerah bertindak sebagai *stewards*, penerima amanah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi organisasi dan para pengguna informasi keuangan pemerintah, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya.

Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas (Nordiawan, 2010). Berarti semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mulyana (2006) menyatakan penyajian neraca daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Siti Aliyah dan Aida Nahar (2012) menyatakan penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya penyajian laporan keuangan daerah akan berimplikasi terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Faktor utama untuk mewujudkan akuntabilitas adalah dengan penyajian laporan keuangan yang relevan, andal, mudah dipahami, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Diduga penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Penggunaan metode penelitian kuantitatif dalam penelitian ini dinilai tepat dan sesuai dikarenakan penelitian ini menggunakan angka-angka sebagai indikator variabel penelitian.

Populasi adalah sekaligus sampel dalam penelitian ini yaitu seluruh Pegawai yang berkerja di kantor Badan Pengelolaan Aset Keuangan Daerah Kota Palopo.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari responden pada kantor Badan Pengelolaan Aset Keuangan Daerah Kota Palopo. Pada penelitian ini data primer tersebut diperoleh melalui alat pengumpul data pokok berupa kuisioner yang disebarakan secara langsung kepada responden. Kuisioner menggunakan Skala Likert lima poin yaitu : Setuju (SS = 5); Setuju (S = 4); Netral (N = 3); Tidak Setuju (TS = 2) dan Sangat Tidak Setuju (STS = 1). Kemudian, data tersebut akan dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda dan diuji dengan uji validitas dan realibilitas serta uji hipotesis dengan bantuan *software* SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Penggunaan uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor item masing-masing pertanyaan dengan total skor pertanyaan. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan program SPSS. Pengujian validitas jika nilai r hitung lebih besar dari r tabel (pada taraf signifikansi 0,05) maka butir pernyataan tersebut dikatakan valid. Berikut ini disajikan validitas dari masing-masing variabel pada tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Butir Pertanyaan	Pearson Corelation	Sig (2- Tailed)	Keterangan	
X	LPK1	0,792**	0,000	VALID
	LPK2	0,894**	0,000	VALID
	LPK3	0,872**	0,000	VALID
	LPK4	0,792**	0,000	VALID
	LPK5	0,684**	0,000	VALID
	LPK6	0,734**	0,000	VALID
	LPK7	0,471**	0,000	VALID
	LPK8	0,730**	0,000	VALID
	LPK9	0,752**	0,000	VALID
Y	RA1	0,626**	0,000	VALID
	RA2	0,483**	0,000	VALID
	RA3	0,731**	0,000	VALID
	RA4	0,417**	0,000	VALID
	RA5	0,528**	0,000	VALID

	RA6	0,432**	0,000	VALID
	RA7	0,212**	0,000	VALID
	RA8	0,483**	0,000	VALID
	RA9	0,401**	0,000	VALID
	RA10	0,347**	0,000	VALID

Sumber : Data diolah di SPSS tahun 2020

Berdasarkan tabel 1 diatas diketahui bahwa variabel Laporan Penyajian Keuangan dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah memiliki nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan dalam penelitian tersebut valid.

Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban dari responden itu stabil dari waktu ke waktu. Nilai ketentuan untuk mengukur realibilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Suatu konstruk dinyatakan reliabel jika memiliki *Cronbach Alpha* > 0,60.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Laporan Penyajian Keuangan (X)	0,902	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	0,620	Reliabel

Sumber: Data diolah di SPSS tahun 2020

Berdasarkan tabel 2 di atas menunjukkan bahwa variabel Penyajian Laporan Keuangan, dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai nilai cronbach's alpha lebih besar dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa item pertanyaan dalam penelitian ini bersifat reliabel. Sehingga setiap item pertanyaan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten dan apabila pertanyaan diajukan kembali maka akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antara variabel independen yaitu *due professional care* dan kompetensi terhadap variabel dependen yaitu kualitas audit. Adapun hasil uji analisis regresi linear berganda disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linier Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	31.739	3.187		9.960	.000		
X	.392	.075	.681	5.254	.000	0.989	1.014

a. Dependent Variable: AkuntabilitasPengelolaanKeuanganDaerah

Sumber : Data diolah di SPSS tahun 2020

$$Y = 31.739 - 392 X + e$$

Model tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a) Nilai konstanta adalah 31.739 ini menunjukkan bahwa, jika variabel independen (laporan penyajian keuangan) bernilai nol (0), maka nilai variabel dependen (Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah) sebesar 31.739 satuan.

b) Koefisien regresi Penyajian Laporan Keuangan (b2) adalah 0,392 dan bertanda positif. Hal ini berarti, nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,392 jika nilai variabel X mengalami kenaikan. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel Penyajian Laporan Keuangan (X) dengan variabel Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah (Y). Semakin tinggi Penyajian Laporan Keuangan, maka Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah semakin meningkat.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi dalam regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut hasil pengolahan data koefisien determinasi.

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,681 ^a	,463	,446	1,285

a. Predictors: (Constant), Laporan Penyajian Keuangan.

Sumber: Data diolah di SPSS tahun 2020.

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa hubungan antara Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah dengan variabel independennya kuat. Sedangkan nilai R square sebesar 0,463 atau 46,3% ini menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah dapat dijelaskan oleh variabel Laporan Penyajian Keuangan Daerah sebesar 46,3% sedangkan sisanya 53,7% dapat dijelaskan dengan variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.

Uji Parsial (Uji t)

Uji t bertujuan untuk menguji secara parsial pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tersebut dapat dilihat dengan membandingkan nilai probabilitas (*p-value*) dari masing-masing variabel dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 dengan ketentuan jika *p-value* < 0,05 dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil uji t:

Tabel 5. Hasil Uji t Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

1	(Constant)	31,739	3,187		9,960	,000
	Laporan					
	Penyajian Keuangan	,392	,075	,681	5,254	,000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber : Data diolah di SPSS tahun 2020

Berdasarkan tabel 5 Melalui statistik uji-t yang terdiri dari Penyajian Laporan Keuangan Pengujian Hipotesis Pertama (H1) menunjukkan bahwa variabel tekanan anggaran waktu memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti H diterima sehingga dapat dikatakan bahwa tekanan anggaran waktu berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah. Nilai t yang bernilai +5,254 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dikatakan signifikan karena nilai sig. variabel penyajian laporan keuangan daerah adalah 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Artinya, apabila sig. lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen tersebut mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependennya.

Penyajian laporan keuangan yang baik adalah salah satu faktor untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang diterima umum. Laporan keuangan yang wajib dibuat oleh pemerintah daerah adalah laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan atas laporan keuangan merupakan elemen penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berarti semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah diuji dapat ditarik kesimpulannya bahwa: Penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan nilai hitung adalah 5,254 dengan nilai signifikansi 0,000 yang berada di bawah atau lebih kecil 0,05,. Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan nilai uji statistik F hitung adalah sebesar 27,602 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan nilai uji statistik R hitung adalah sebesar 0,681 dengan nilai R square sebesar 0,463 atau 46,3%.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

Laporan keuangan merupakan salah satu media penyampaian pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian bisa diketahui bahwa laporan keuangan memberi kontribusi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Mengingat pentingnya informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan maka pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kota Palopo harus mampu menyajikan laporan keuangan yang andal, relevan dan lengkap sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan serta menyediakan akses yang mudah bagi para pengguna laporan keuangan untuk mengetahui dan mendapatkannya, terutama bagi para pengguna eksternal.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka pemerintah daerah khususnya pemerintah Kota Palopo diharapkan untuk memperhatikan beberapa hal berikut :

1. Akuntabilitas yang efektif tergantung pada akses publik terhadap laporan keuangan daerah yang dapat dibaca dan dipahami. Untuk mendukung akuntabilitas yang efektif tersebut, pemerintah daerah Kota Palopo diharapkan dapat mempublikasikan laporan keuangannya melalui media massa, seperti surat kabar, radio, website, dan media lainnya yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah Kota Palopo terhadap masyarakat.
2. Penyajian laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, memungkinkan kontrol dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan serta semua sumber daya yang menjadi kewenangan pemerintah daerah bisa berjalan dengan baik. Hal ini akan semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, dengan demikian efisiensi dan efektivitas pengeluaran pemerintah daerah bisa terlaksana dan pada akhirnya akan mampu meminimalisir praktek korupsi dan nepotisme oleh para aparatur sehingga clean government secara bertahap akan bisa terwujud.
3. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam mengumpulkan data dapat dilengkapi dengan menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis, penggantian teknik pengambilan sampel penelitian serta dilakukan perubahan dalam pemilihan alternatif jawaban pada kuesioner penelitian. Selain itu juga dapat memperluas sampel dan lokasi penelitiannya agar hasil penelitian nantinya dapat digeneralisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Safitri, Ratna. 2009. Aksesibilitas, Penyajian dan Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi Empiris di Kabupaten Semarang). Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Volume 2 (1).
- Sukhemi. 2010. Pengaruh Penyajian Neraca Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah. Akmenika Jurnal Akuntansi dan Manajemen. Volume 5, April: 85-100.
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo, 2004, Membangun Akuntabilitas Publik Keuangan Negara, Cetakan Majalah Media Akuntansi, Edisi No. 39, April, hal. 12
- Haryanto dkk, 2007. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Pertama. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Wilson & Kattelus, "Accounting For Governmental and Non Profit Entities" 2002 13th Edition, Irwin, North America.
- Stanbury, W.T., 2003, 'Accountability to Citizens in the Westminster Model of Government: More Myth Than Reality', Fraser Institute Digital Publication, Canada.
- Abdul Rohman (2009), Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan Dan Kinerja Pemerintah Daerah (Survei Pada PEMDA Di Jawa Tengah).

Subaweh. Imam, (2008). Agency Theory dalam pemerintahan daerah.

Belkaoui, Ahmed Riahi, 2001. Teori Akuntansi, Diterjemahkan oleh Marwata dkk. Salemba Empat, Jakarta.

Herawati, Nurul dan Zaki Baridwan. 2007. Manajemen Laba Pada Company Yang Melanggar Perjanjian Hutang.

Harahap, Sofyan Syafri. 2015. Analisis Kritis atas Laporan Keuangan. Edisi 1-10. Jakarta: Rajawali Pers.

Diamond, Jack. 2002. Performance Budgeting-Is Accrual Accounting Required? IMF Working Paper. Fiscal Affairs Department.

Katz, Ellen, 2004, Transparency in Government How American Citizens Influence Public Policy, Journal of Accountancy, Juni 2004, hal. 1-2

Mulyana, Budi. 2006. Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi Pemerintah.

Shende, Suresh dan Tony Bennet. 2004. Concept Paper 2: Transparency and Accountability in Public Financial Administration. UN DESA.

Nordiawan Deddi. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat

Aliyah, Siti dan Nahar, Aida. 2012. Pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten jepara. Jurnal akuntansi dan auditing.

Steccolini, Ileana. 2002. Local Government Annual Report: an Accountability Medium. EIASM Conference on Accounting and Auditing in Public Sector Reforms, Dublin. September 2002.

Nasution, Saufi Iqbal. 2009. Pengaruh Penyajian Neraca SKPD dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD terhadap Transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara.

Peggy, Sande. 2013. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Skripsi Universitas Negeri Padang.

Halim, Abdul, 2007. Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Wahyuni, Putu Sri, sulindawati dkk 2014. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah kabupaten Bandung. Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59, Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) mengenai ketentuan pengelolaan keuangan negara.

PSAK No .1 (Revisi 2009) Mengenai Penyajian laporan keuangan

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 01 – 2 Mengenai Laporan Keuangan

Standar Akuntansi Pemerintahan (2005) Mengenai Penyusunan Laporan Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan (2017:2) Mengenai Laporan Keuangan.

Standar Akuntansi Keuangan (2009:1) Mengenai Penyajian Laporan Keuangan

LAN. 2000. Akuntabilitas dan Good Governance. Jakarta: Erlangga